

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Palembang

1. Sejarah Kota Palembang

Kota Palembang merupakan ibu kota tertua di Indonesia. Kota Palembang dipandang sebagai pusat dari kerajaan Sriwijaya karena adanya penemuan terhadap prasasti Kedukan Bukit (683 M) di wilayah Bukit Siguntang, atau lebih tepatnya di bagian sebelah barat Kota Palembang. Kota Palembang diperingati setiap tanggal 16 Juni 682 M atau berbarengan dengan dibentuknya wanua yang dijadikan sebagai kota pada saat itu.

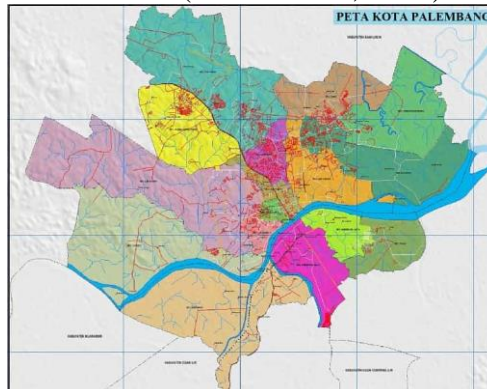
Gambar 3.1 Kota Palembang
Sumber: (Tribunnews.com, 2018)



Berdasarkan topografi, Kota Palembang dikelilingi oleh air bahkan masih terendam oleh air. Air tersebut berasal dari sungai, rawa bahkan air hujan. Maka tak heran jika sebagian besar Kota Palembang masih terendam air. Sampai sekarang terdapat sebesar 52,24% tanah di wilayah Kota Palembang yang masih digenangi oleh air. Kondisi inilah yang membuat nenek moyang menamakan kota ini sebagai Kota Palembang dalam bahasa melayu Pa atau Pe diartikan sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan, sedangkan lembang atau lembeng diartikan sebagai tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air. Sedangkan menurut bahasa melayu Palembang, lembang atau lembeng merupakan genangan air. Jadi Kota Palembang merupakan suatu tempat yang masih digenangi oleh air.

2. Letak Geografis Kota Palembang

Gambar 3.2 Peta Kota Palembang
Sumber: (Peta-hd.com, 2019)



Secara astronomis, Kota Palembang terletak antara 2° 52' sampai 3° 5' Lintang Selatan dan 104° 37' sampai 104° 52' Bujur Timur dengan rata-rata ketinggian 8 meter diatas permukaan air laut. Kota Palembang memiliki luas wilayah mencapai 400,61 km². Secara geografis Kota Palembang berbatasan dengan Kabupaten Banyuasi di bagian barat, timur, dan utara. Sementara pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 1988, wilayah Kota Palembang memiliki luas sebesar 400,61 km² atau 40.061 Ha. Gandus merupakan kecamatan terluas diantara kecamatan lainnya yaitu dengan luas wilayah 68,78km² / 17,17%. Sementara Iilir Barat II menjadi kecamatan dengan luas paling kecil diantara lainnya yaitu hanya mencapai 6,22km²/1,55% saja.

Tabel 3.1 Kecamatan Kota Palembang

No.	Kecamatan	Luas Daerah (KM ²)
1	Iilir Barat II	6,22
2	Kemuning	9
3	Gandus	68,78
4	Iilir Timur II	10,82
5	Seberang Ulu I	8,28
6	Kalidoni	27,92
7	Kertapati	42,56
8	Iilir Timur III	14,76
9	Jakabaring	9,16
10	Sako	18,04
11	Seberang Ulu II	10,69
12	Sematang Borang	36,98
13	Plaju	15,17
14	Sukarami	51,46

15	Alang- Alang Lebar	34,58
16	Iilir Barat I	19,77
17	Iilir Timur I	6,5
18	Bukit Kecil	9,92

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut SK Nomor 136/4123/BAK tahun 2018 mengenai wilayah administrasi, Kota Palembang pernah mengalami pemekaran Kecamatan. Pada tahun 2018 silam, Kecamatan Seberang Ulu I dimekarkan dan dibagi menjadi Kecamatan Jakabaring. Sementara Kecamatan Iilir Timur II dibagi lagi menjadi Kecamatan Iilir Timur III. Dengan demikian secara administrasi terdapat 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan di wilayah Kota Palembang saat ini.

3. Wilayah Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwasannya Kota Palembang termasuk dalam daerah tingkat II. Hal ini karena adanya kesatuan antara masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, mempunyai hak serta mempunyai kewajiban untuk mengatur serta mengurus persoalan rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007, kelurahan di Kota Palembang sudah beberapa kali dilakukan pemekaran. Menurut Perda Kota Palembang No. 20 Tahun 2007 mengenai pemekaran kecamatan, disebutkan bahwa pada mulanya terdapat 14 kecamatan dan 103 kelurahan di Kota Palembang. Namun, setelah adanya pemerकरa wilayah kemudian di Kota Palembang terdapat 16 Kecamatan dan 107 kelurahan. Kecamatan Alang-Alang Lebar merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Sukarame, sedangkan Kecamatan Sematang Borang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Sako. Sementara itu terdapat 4 kelurahan baru dari hasil pemekaran diantaranya Kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sako Baru, dan Kelurahan Karya Mulya.






B. Mahasiswa dan Politik di Kota Palembang

Kota Palembang mempunyai banyak Perguruan Tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perguruan tinggi tersebut diantaranya yaitu Politeknik Negeri Sriwijaya, Universitas Sjahkirti, Universitas Tridinanti Palembang, Universitas Bina Darma, Universitas Sriwijaya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Politeknik Akamigas Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Universitas Kader Bangsa, Universitas Tamansiswa, STIE APRIN Palembang, Universitas Indo Global Mandiri, Universitas Muhammadiyah, Universitas PGRI dan Universitas Terbuka.

Terdapat 10 universitas terbaik di Kota Palembang versi Alexa Rank. Universitas tersebut dijabarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.2 Universitas terbaik di Palembang versi Alexa Rank

Sumber: (kampusimpian.com, 2021)

No	Nama Kampus	Akreditasi	Lokasi	Foto
2	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Baik Sekali	Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Kel. Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang	
3	Politeknik Negeri Sriwijaya	Baik Sekali	Jl. Sriwijaya Negara, Bukit Lama, Kota Palembang	
4	Universitas Muhammadiyah Palembang	B	Jl. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Seb. Ulu II, Plaju, Kota Palembang	
5	Universitas Bina Darma	B	Jl. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Seberang Ulu II, Plaju, Kota Palembang	
6	Universitas PGRI Palembang	B	Jl. Lorong Gotong 11 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang	

7	Universitas Indo Global Mandiri	B	Jl. Jenderal Sudirman Km. 4 No. 62, 20 Ilir D.IV. Ilir Timur I, Kota Palembang	
8	Universitas Tridinati	B	Jl. Kapten Marzuki No. 2446, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang	
9	Universitas Tamansiswa	B	Jl. Taman Siswa No. 261, Kepandean Baru, Ilir Timur I, Kota Palembang	
10	Universitas Kader Bangsa	Baik Sekali	Jl. Mayjen HM Ryacudu No. 88, 7 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang	

Jumlah mahasiswa setiap Universitas beragam dari Universitas Sriwijaya memiliki mahasiswa sebanyak 30.000 mahasiswa dan Universitas Islam Negeri Palembang memiliki mahasiswa 20.000 kurang lebih (PDDikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi), itu menandakan bahwa setiap jumlah mahasiswa di setiap Universitas itu berbeda beda. Mahasiswa di kota Palembang juga sering melakukan aktivitas politik seperti mengikuti menyuarakan aspirasi dalam beberapa kejadian seperti melakukan aksi tentang perubahan Undang-undang KPK yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan yang terakhir dilakukan oleh mahasiswa kota Palembang adalah melakukan aksi terkait Omnibus Law.

Keberadaan Mahasiswa sangat penting dalam perpolitikan Indonesia karena mahasiswa sebagai pemilih pemula memiliki peranan yang cukup penting dalam pemilu di Indonesia karena jumlah pemilih pemula di Indonesia sangat besar apalagi makin kedepan jumlah pemilih pemula akan semakin besar. Sehingga beberapa partai merekrut kaum muda, pemilih pemula termasuk mahasiswa untuk masuk ke kader kader mereka seperti PKS, PKB dan PSI besarnya peranan mahasiswa bagi Partai Politik itu membuat Partai Politik tertarik merekrut mahasiswa menjadi kader kader mereka.

Partai Politik pun mulai melakukan pendekatan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi kampus guna memperbanyak suara yang didapatkan partai seperti IPNU dan PMII adalah bagian dari kerjasama dengan PKB, dan Pemuda Muhammadiyah yang memiliki relasi dengan PAN, dan seperti zaman dahulu ada Garda PKS yang mendukung PKS dengan berkerjasamanya organisasi organisasi kampus dengan partai politik itu menandakan bahwa ada feedback yang di dapat antar dua pihak, Organisasi-Organisasi kampus yang melakukan kerjasama dengan partai politik adalah untuk kepentingan organisasi itu sendiri seperti membantu dalam Sponsorship kegiatan yang dibuat oleh organisasi itu sendiri dan feedback yang didapat oleh partai adalah mendapatkan dukungan yang lebih dari organisasi tersebut baik dari suara maupun dukungan menjadi saksi dari partai tersebut dalam pemilihan umum.

Menurut Agung Prase, dalam negara demokrasi peran partai politik sangatlah penting dan dibutuhkan. Hal ini dikarenakan negara demokrasi berjalan sesuai dengan kemauan dan kehendak dari rakyat. Rakyat memiliki kuasa paling tinggi, rakyat juga berhak untuk menyetujui serta melaksanakan organisasi yang ada didalam negara. Maka dari itu, adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu syarat utama untuk melaksanakan sebuah demokrasi. Lembaga perwakilan rakyat tersebut dibentuk pada saat pemilihan umum dan ditentukan oleh rakyat sendiri. Parpol menjadi salah satu bentuk untuk mewujudkan kebebasan berserikat serta menjadi syarat berjalannya sebuah demokrasi dalam suatu negara.

Partai Politik adalah unsur terpenting dalam negara yang menganut sistem demokrasi termasuk Indonesia, di Indonesia sendiri memiliki partai politik yang dimana di dalam undang undang ada 13 partai politik yang disahkan oleh undang undang.

C. Sejarah partai politik di Indonesia.

Indonesia telah mengalami perubahan sistem politik yang signifikan sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya di tahun 1998. Tumbangnya rezim Orde Baru saat itu menandakan juga runtuhnya sistem politik otoriter yang dibangun oleh Soeharto selama 32 tahun. Demokrasi menjadi sistem baru yang diterapkan di Indonesia dan di harapkan dapat membawa warna perubahan politik negara menjadi lebih baik lagi. Salah satu harapan terhadap sistem demokrasi ini adalah terbukanya ruang yang lebih luas bagi warga negara untuk terlibat dalam kehidupan berpolitik, termasuk dengan mendirikan partai politik.

Sejak Indonesia berdemokrasi di tahun 1998, banyak partai yang baru lahir sebagai tanda terbukanya saluran politik bagi warga negara yang hampir tertutup rapat seama orde baru. Situasi ini sangat berbeda dengan masa Pemerintahannya Soeharto yang saat itu hanya memiliki Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Jumlah parpol di Indonesia pada masa reformasi politik meningkat pesat. Di tahun 1999, Indonesia memiliki 48 parpol peserta pemilu. Adapun 48 partai tersebut adalah Partai Indonesia Baru, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai Ummat Islam, Partai Kebangkitan Umat, Partai Masyumi Baru, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Abul yatama, Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Rakyat Demokratik, Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, Partai Katholik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Keadilan, Partai Naudlatul Umat, PNI-Front Marhenis, Partai Ikatan Pendidikan Kmd Indonesia, Partai Replublik, Partai Islam Demokrat, PNI-Massa Marhaen, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, Partai Daulat Rakyat, Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan Kesatuan, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Nasional Bangsa Indonesia, Partai Bhineka Tunggal Ika, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Nasional Demokrat, Partai Umat Muslimin Indonesia, Partai Pekerja Indonesia.

Pada tahun 2004 Partai Politik yang mengikuti Pemilu mengalami Penurunan dari 48 Partai Politik menjadi 24 Partai Politik, adapun 24 itu adalah Partai Nasional Indonesia Marheenisime, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan dan Pembangunan, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Peduli Karya Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Patriot Pancasila, Partai Serikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Pelopor.

Pada pemilu 2009 jumlah Partai Politik yang mengikuti Pemilu meningkat drastis yang sebelumnya hanya 24 menjadi 44 Partai Politik Yang terdiri dari 38 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh, beda 4 angka dengan Pemilu pada tahun 1999, adapun 44 Partai itu adalah, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Peduli Rakyat Indonesia, Partai gerakan Indonesia Raya, Partai Barisan Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Kedaulatan,

Partai Persatuan Daerah, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Indonesia Merhaniesme, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Replublika Nusantara, Partai Pelopor, Partai Golongan Karya, Partai Perstuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kebnagkitan Nasional Ulama, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Daulat Aceh, Partai Suara Independen, Rakyat Aceh, Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh, Partai Bersatu Aceh, Partai Merdeka, Partai Persatuan Naudhlatul Ummah Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Buruh.

Pada pemilu tahun 2014 jumlah partai politik yang megikuti pemilu hanya 12 partai politik, Partai itu adalah Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Damai Aceh dan Partai Nasional Aceh.

Pada Tahun 2019, Partai Politik yang mengikuti pemilu berjumlah 14 partai politik, Partai itu adalah Partai Amanat Nasional, Partai Berkarya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia. Setiap tahun Pemilihan Umum di indonesia jumlah Partai Politik selalu mengalami perubahan jumlah partisipan Partai Politik itu sendiri dalam Pemilihan Umum, banyak faktor yang mempengaruhi jumlah nya partai politik di setiap tahun pemilu selalu berubah ubah, salah satu faktornya adalah tidak nya memenuhi syarat Partai Politik itu sendiri dalam mengikuti Pemilihan Umum di Indonesia.

D. Perkembang Partai Sarekat Dagang Islam Di Kota Palembang

Sarekat Islam merupakan Organisasi massa yang mampu menarik banyak perhatian rakyat pada masa pergerakan nasional. Pada mulanya Sarekat Islam merupakan sebuah perkumpulan dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (Noer, 1991: 115-116). Pada tahun 1930 PSI berubah nama menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia

Bersamaan dengan ini, tahun 1930-an terjadi krisis yang dikenal dengan krisis Malaise. Krisis Malaise berdampak pada merosotnya perekonomian di Hindia Belanda termasuk Palembang, akan tetapi Partai Syarikat Islam Indonesia berhasil mempertahankan anggota yang di Palembang, dan memiliki keanggotaan berjumlah 25000 orang dan 50 cabang pada tahun 1939 karena di dukung penuh oleh Komunitas Dagang dan sekolah sekolah agama.

Pergerakan PSII di Kota Palembang di dukung oleh beberapa tokoh yang berpengaruh yaitu A.S. Matcik, Hamzah Koentjit, R. Fanami, dan K.H. Azhari.

A.S. Matcik merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di PSII cabang Palembang. A.S Matcik ditunjuk oleh LT PSII sebagai wakil LT yang bertugas memberi tuntunan kepada cabang-cabang yang baru. Dalam melaksanakan tugas tersebut A.S. Matcik berkeliling ke seluruh daerah Sumatera Selatan. Propaganda yang dilakukan PSII terus berjalan untuk memperluas wilayah kekuasaan partai dddan merekrut lebih banyak anggota hingga di pedalaman Palembang. Melalui Propaganda tersebut PSII secara langsung menyebarkan agama Islam dengan menyampaikan dakwah pada saat berpidato. Melalui pemimpin-pemimpin tersebut, PSII menjadi salah satu organisasi yang kuat, dapat bertahan hingga berakhirnya masa kolonial khususnya di Palembang.

Sejak dihapuskannya kesultanan di Kota Palembang pada tahun 1852 oleh Hindia Belanda, Palembang menjadi Kota pada tahun 1906. Dengan berkembangnya Partai Politik pasca masa Reformasi, Palembang pun mengalami Perkembangan dalam segi Partai Politik, dan ini berdampak pada masa Pemilihan Umum yang terjadi di Kota Palembang, Setiap masa Pemilu para Partai Politik berlomba untuk menarik suara masyarakat yang berada di kota Palembang sehingga tak heran Partai Politik melakukan apa saja demi bisa menarik perhatian masyarakat kota Palembang.

Hal ini terbukti Pada Pemilihan Umum pada tahun 2003 di Kota Palembang yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Selatan adalah Ir. H. Syahril Oesman, M.M. yang berpasangan dengan Mahyuddin N.S dan yang menjadi Walikota nya adalah Ir. H. Eddy Santana Putra dan H.Romi Herton, S.H, M.H. Pada tahun 2008 Gubernur Sumatera Selatan yang terpilih adalah Alex Noerdin yang berpasangan dengan Eddy Yusuf yang mengalahkan pihak pertahana Syahril Oesman dalam Pemilihan Umum pada tahun 2008 dan pada saat itu walikota Palembang masih di pegang oleh Eddy Santana Putra yang memenangkan Pemilu pada tahun 2008 dan sekaligus menjabat walikota Palembang selama 2 periode. Pada tahun 2013 Alex Noerdin berhasil memenangkan kembali pada pemilihan umum Gubernur Sumater Selatan dan menjabat Gubernur Sumatera Selatan selama 2 Periode dan dalam Pemlihan Umum Gubernur pada saat itu Alex Noerdin berpasangan dengan Ishak Mekki dan yang memenangkan pemilihan Walikota Palembang pada saat itu adalah Romi Herton yang berpasangan dengan Harnojoyo tidak lama dari itu Walikota Palembang pada saat itu Romi Herton terjerat kasus suap dalam kasus pemilihan umum di kota Palembang dan masuk penjara, jabatan walikota di gantikan oleh wakilnya sendiri yaitu Harnojoyo dan Harnojoyo memilih wakilnya adalah Fitrianti Agustinda.

Pada tahun 2018 masa Gubernur Alex Noerdin berakhir dan batas dia mencalonkan dirinya sudah habis karena hanya cukup 2 periode saja dalam memimpin, dengan berakhirnya masa jabatan Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan berganti menjadi Herman Deru yang berpasangan dengan Mawardi Yahya yang memenangkan Pemilihan Umum di Sumatera Selatan pada tahun 2018 dan Walikota sebelumnya menjabat kembali sebagai Walikota Palembang karena memenangkan kembali pada Pemilihan Umum kota Palembang pada thaun 2018 yaitu Harnojoyo dan Fitrianti Agustinda.